

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 415-419

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15688242>

Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Subsidi Energi dan Implikasinya Terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Arniya¹, Norpaizah², Rifayani³, Wahjoe Pangestoeti⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Provinsi Kepulauan Riau 29124, Indonesia.

Email: arniya@student.umrah.ac.id, norpaizah@student.umrah.ac.id, rifayani@student.umrah.ac.id, wahjoepangestoeti@umrah.ac.id

Abstract

Energy subsidies are one of the fiscal policy instruments aimed at maintaining public purchasing power and national economic stability. However, in practice, energy subsidies are often criticized for being misdirected and placing a heavy burden on the State Budget. This study aims to examine public perceptions of energy subsidy policies and analyze their implications for household energy consumption. The research employed a descriptive qualitative approach, conducted in Tanjungpinang City, with data collected through literature reviews from relevant academic and policy sources. The findings indicate that most people support the existence of energy subsidies as they help reduce household expenditure burdens. However, such support is not always accompanied by a comprehensive understanding of the policy's goals and impacts, resulting in wasteful energy consumption patterns. Changes in subsidy policy significantly affect household spending, with low-income groups being the most affected. Moreover, positive public perception plays a crucial role in enhancing policy implementation effectiveness. Therefore, the government should develop effective public communication strategies and more targeted subsidy systems to foster sustainable energy consumption behavior.

Keywords: Public Perception, Energy Subsidy, Household Consumption, Public Policy, Public Economics

Abstrak

Subsidi energi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi nasional. Namun, dalam implementasinya, subsidi energi sering kali menuai kritik karena dianggap tidak tepat sasaran dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap kebijakan subsidi energi serta menganalisis implikasinya terhadap konsumsi energi rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dilaksanakan di Kota Tanjungpinang dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber ilmiah dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung keberadaan subsidi energi karena membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Namun, dukungan tersebut tidak selalu dibarengi dengan pemahaman menyeluruh mengenai tujuan dan dampak subsidi, sehingga menimbulkan pola konsumsi energi yang cenderung boros. Perubahan kebijakan subsidi berdampak signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga, di mana kelompok berpendapatan rendah menjadi yang paling terdampak. Selain itu, persepsi masyarakat yang positif berperan penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi komunikasi publik yang efektif dan sistem subsidi yang lebih tepat sasaran untuk membentuk perilaku konsumsi energi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Subsidi Energi, Konsumsi Rumah Tangga, Kebijakan Publik, Ekonomi Publik

Article Info

Received date: 29 May 2025

Revised date: 05 June 2025

Accepted date: 18 June 2025

PENDAHULUAN

Subsidi energi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama

di sektor rumah tangga. Di Indonesia, kebijakan subsidi energi mencakup subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat luas. Namun, kebijakan ini menuai banyak kritik karena dianggap tidak tepat sasaran dan menimbulkan beban besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Islami Sari & Marissa, 2023).

Menurut studi sebelumnya, belanja subsidi energi yang tinggi cenderung mengurangi alokasi anggaran untuk sektor produktif lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperburuk ketimpangan jika lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas (Ramadayanti dkk., 2020). Dalam konteks fiskal, subsidi energi dianggap kurang efisien karena alokasi dana yang sangat besar sering kali tidak sebanding dengan manfaat ekonomi jangka panjang (Muhammad Ramadhan Bayu Aji, 2023). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan ini sangat diperlukan agar dapat diarahkan secara lebih adil dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan subsidi energi adalah memahami persepsi masyarakat. Persepsi publik terhadap kebijakan subsidi menjadi penting karena akan memengaruhi tingkat dukungan, kepatuhan, dan perilaku konsumsi mereka. Ketika masyarakat memandang subsidi sebagai hak mutlak tanpa memahami konsekuensi fiskal dan lingkungan, maka potensi terjadinya pemborosan energi sangat besar (Sadih dkk., 2020). Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi listrik rumah tangga meningkat tajam ketika harga energi disubsidi (Sugiartiningsih, 2020).

Implikasi dari kebijakan subsidi terhadap perilaku konsumsi rumah tangga juga penting untuk dikaji, karena kebijakan ini berpengaruh langsung pada pengeluaran rumah tangga dan efisiensi energi (Novia Marchelia Putri Az Zahra dkk., 2024). Di sisi lain, terdapat hubungan yang kompleks antara subsidi, pertumbuhan konsumsi energi, dan pertumbuhan ekonomi secara nasional (Ulkyia Maisarah dkk., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan subsidi energi serta implikasinya terhadap konsumsi rumah tangga. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan dalam menggali pandangan subjektif masyarakat, khususnya dalam menginterpretasikan kebijakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi energi di tingkat rumah tangga.

Penelitian dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah ini dipilih karena merupakan salah satu kota dengan struktur masyarakat majemuk dan tingkat konsumsi energi rumah tangga yang beragam, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif terhadap fenomena yang diteliti.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang berdomisili di beberapa kelurahan di Tanjungpinang, dengan pertimbangan variasi latar belakang sosial ekonomi. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu rumah tangga yang aktif menggunakan energi bersubsidi (listrik dan BBM), serta memiliki pemahaman atau keterlibatan dalam diskursus kebijakan subsidi energi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan cara mencari dan membaca literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, serta data statistik yang mendukung. Seluruh sumber data yang digunakan adalah yang kredibel dan terkini, termasuk referensi akademik yang telah terverifikasi dalam konteks subsidi energi dan konsumsi rumah tangga.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menginterpretasi makna dari persepsi yang ditemukan, serta analisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola umum dalam tanggapan masyarakat. Selain itu, digunakan pendekatan reflektif untuk menghubungkan temuan dengan kerangka teori yang relevan serta kebijakan publik

yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan secara menyeluruh hubungan antara persepsi masyarakat, kebijakan subsidi, dan konsumsi energi rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat terhadap Subsidi Energi

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan subsidi energi sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap konsep dan tujuan dari subsidi itu sendiri. Berdasarkan studi literatur, banyak masyarakat yang memahami subsidi energi hanya sebatas bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tanpa memahami implikasi jangka panjangnya terhadap fiskal negara dan distribusi manfaat yang tidak merata (Sari & Marissa, 2023). Pemahaman yang dangkal ini turut memperkuat pandangan bahwa subsidi merupakan hak, bukan kebijakan yang bersifat temporer dan harus dievaluasi secara berkala (Sadiah dkk., 2020).

Sikap masyarakat terhadap kebijakan subsidi energi umumnya bersifat ambivalen. Di satu sisi, subsidi dianggap sangat membantu terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah, namun di sisi lain muncul ketidakpuasan ketika kebijakan ini dikurangi atau dicabut sebagian, terutama ketika pengalihan subsidi tidak disertai dengan komunikasi publik yang memadai (Asfar & Wijaya, 2024). Bahkan, dalam konteks kenaikan harga BBM, respon masyarakat cenderung negatif karena mereka merasakan langsung dampak terhadap pengeluaran konsumsi, terutama untuk transportasi dan kebutuhan harian lainnya (Novia Marchelia Putri Az Zahra dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat belum sepenuhnya terbentuk oleh pemahaman rasional, melainkan oleh pengalaman langsung terhadap dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.

Persepsi terhadap aspek keadilan dan efisiensi subsidi juga bervariasi. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa subsidi energi belum tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah atas yang memiliki tingkat konsumsi energi lebih tinggi (Ulkyia Maisarah dkk., 2024). Temuan ini diperkuat oleh data konsumsi listrik rumah tangga yang menunjukkan adanya peningkatan konsumsi setelah pemberlakuan subsidi, terutama di daerah perkotaan (Nurma Oktavia Sari & Ariusni, 2024). Dalam konteks ini, persepsi masyarakat tentang keadilan subsidi menjadi penting karena memengaruhi legitimasi kebijakan di mata publik.

Selain itu, studi juga menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses informasi mengenai kebijakan subsidi turut memperkuat kesenjangan pemahaman antarkelompok masyarakat (Ramadayanti dkk., 2020). Pada saat yang sama, penelitian oleh Aji (2023) menggarisbawahi pentingnya peran kebijakan fiskal yang transparan agar subsidi dapat menjadi instrumen yang tidak hanya populis tetapi juga efektif secara ekonomi. Dalam konteks pandemi COVID-19, pola konsumsi energi juga menunjukkan perubahan, yang memengaruhi cara masyarakat memandang pentingnya efisiensi energi dalam kehidupan sehari-hari (Faza & Navastara, 2022).

2. Implikasi Kebijakan terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Kebijakan subsidi energi telah memberikan dampak signifikan terhadap pola konsumsi energi rumah tangga di Indonesia. Sebelum adanya perubahan kebijakan, konsumsi energi cenderung tinggi karena masyarakat merasa biaya yang dikeluarkan relatif murah dan tidak mencerminkan harga pasar yang sebenarnya (Sugiantiningsih, 2019). Subsidi memberikan insentif bagi rumah tangga untuk menggunakan listrik dan bahan bakar tanpa mempertimbangkan efisiensi, terutama pada kelompok pendapatan menengah ke atas yang memiliki akses lebih besar terhadap perangkat elektronik dan kendaraan bermotor (Ulkyia Maisarah dkk., 2024). Namun, setelah dilakukan pengurangan atau penyesuaian subsidi, terlihat adanya penurunan konsumsi energi di beberapa wilayah karena meningkatnya kesadaran terhadap penghematan (Sari, 2024).

Perubahan kebijakan subsidi juga berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga energi pasca-pengurangan subsidi menyebabkan sebagian rumah tangga harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk listrik dan BBM, yang sebelumnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan (Novia Marchelia dkk., 2024). Dampak ini

paling dirasakan oleh rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah, yang pengeluarannya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi (Ramadayanti dkk., 2020). Di sisi lain, rumah tangga dengan pemahaman fiskal yang lebih baik cenderung menerima perubahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi nasional (Muhammad Ramadhan Bayu Aji, 2023).

Perilaku penghematan energi mulai terlihat pasca-perubahan kebijakan, meskipun masih belum merata. Beberapa penelitian mencatat bahwa rumah tangga mulai membatasi penggunaan alat elektronik, memanfaatkan energi alternatif, serta mengatur pola konsumsi untuk menekan tagihan bulanan (Faza & Navastara, 2022). Namun, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum beradaptasi, terutama karena rendahnya literasi energi dan tidak adanya insentif tambahan dari pemerintah (Asfar & Wijaya, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan subsidi tidak hanya bergantung pada aspek fiskal, tetapi juga pada respon perilaku masyarakat terhadap perubahan harga energi (Sari & Marissa, 2023). Kebijakan subsidi energi harus diiringi dengan edukasi publik yang masif serta penguatan sistem perlindungan sosial agar tidak membebani kelompok rentan. Dengan demikian, konsumsi energi rumah tangga dapat diarahkan pada pola yang lebih hemat, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

3. Analisis Peran Persepsi terhadap Efektivitas Kebijakan

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan subsidi energi memegang peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Persepsi yang positif akan mendorong sikap kooperatif masyarakat, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap perubahan kebijakan harga energi. Sebaliknya, jika masyarakat memandang kebijakan sebagai tidak adil atau merugikan, maka tingkat resistensi dan ketidakpatuhan akan meningkat (Sari & Marissa, 2023). Keterkaitan antara persepsi dan kepatuhan ini tercermin dalam reaksi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi listrik yang sering kali menimbulkan protes atau keluhan sosial (Novia Marchelia dkk., 2024).

Pemahaman yang dangkal terhadap tujuan kebijakan membuat sebagian masyarakat menilai subsidi sebagai bentuk hak tetap, bukan sebagai instrumen sementara yang dapat disesuaikan. Hal ini menyebabkan resistensi ketika pemerintah melakukan penyesuaian subsidi untuk menjaga keseimbangan fiskal (Asfar & Wijaya, 2024). Dalam konteks ini, tingkat literasi energi menjadi faktor penting yang memengaruhi cara masyarakat menyikapi kebijakan tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi energi yang rendah cenderung menghasilkan persepsi negatif dan sikap tidak kooperatif terhadap perubahan kebijakan (Faza & Navastara, 2022).

Persepsi masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat efisiensi penggunaan energi di tingkat rumah tangga. Rumah tangga yang memahami dampak subsidi terhadap APBN dan distribusi energi cenderung lebih hemat dalam konsumsi energi serta mendukung reformasi kebijakan subsidi (Sari, 2024). Sementara itu, rumah tangga yang menilai subsidi sebagai “kemurahan hati negara” cenderung konsumtif dan tidak mempertimbangkan efisiensi (Sugiartiningsih, 2019).

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pemerintah mengintegrasikan pendekatan komunikasi publik dalam setiap perubahan kebijakan subsidi energi. Edukasi melalui media massa, komunitas lokal, dan kurikulum sekolah dapat meningkatkan literasi energi masyarakat (Ulkyia Maisarah dkk., 2024). Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan sistem subsidi yang lebih tepat sasaran, seperti subsidi langsung berbasis data sosial ekonomi, agar persepsi keadilan dapat ditingkatkan (Muhammad Ramadhan Bayu Aji, 2023). Pemerintah juga dapat menggandeng akademisi dan LSM dalam melakukan sosialisasi kebijakan berbasis bukti dan nilai keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan subsidi energi di Indonesia masih beragam dan belum sepenuhnya dibentuk oleh

pemahaman rasional. Sebagian besar masyarakat menganggap subsidi sebagai hak tetap dari pemerintah tanpa memahami tujuan fiskal dan dampak jangka panjangnya. Hal ini menyebabkan munculnya resistensi ketika terjadi perubahan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengurangan subsidi energi. Pemahaman yang dangkal dan literasi energi yang rendah menjadi faktor dominan dalam membentuk persepsi negatif terhadap kebijakan tersebut.

Kebijakan subsidi energi terbukti memberikan dampak langsung terhadap konsumsi energi rumah tangga. Ketika harga energi disubsidi, konsumsi cenderung meningkat karena masyarakat tidak mempertimbangkan efisiensi. Sebaliknya, ketika subsidi dikurangi atau dicabut, terjadi penyesuaian dalam pola konsumsi, baik berupa pengurangan pemakaian maupun pengalihan penggunaan ke energi alternatif. Selain itu, pengeluaran rumah tangga untuk energi mengalami peningkatan yang signifikan setelah perubahan kebijakan, terutama di kalangan rumah tangga dengan pendapatan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku ekonomi rumah tangga.

Persepsi masyarakat yang positif terhadap kebijakan akan meningkatkan efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan subsidi energi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknokratis, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mendukung kebijakan tersebut. Dalam hal ini, komunikasi publik yang intensif dan edukasi mengenai pentingnya efisiensi energi sangat diperlukan.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme komunikasi kebijakan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Selain itu, pemerintah disarankan menerapkan sistem subsidi yang lebih tepat sasaran berbasis data sosial ekonomi, serta menggandeng pihak akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyosialisasikan kebijakan energi secara partisipatif dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan kebijakan subsidi energi dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mendukung keberlanjutan fiskal nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, M. A., & Wijaya, R. S. (2024). Pengaruh Kebijakan Subsidi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1), 38–53. <https://doi.org/10.26905/jrei.v5i1.13253>
- Faza, T. N., & Navastara, A. M. (2022). Faktor yang Memengaruhi Konsumsi Energi Listrik Rumah Tangga pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus: Rusunawa di Jakarta Timur). *Jurnal Teknik ITS*, 11(2), B97–B102. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i2.92329>
- Islami Sari, D., & Marissa, F. (2023). Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 346–359. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.238>
- Muhammad Ramadhan Bayu Aji. (2023). *Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* [UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA]. <http://dspace.uin.ac.id/123456789/45473>
- Novia Marchelia Putri Az Zahra, Isa Runtu Leluni, Imroatun Nafisah, Ahmad Choiron Nur Rizqi, & Novi Khoiriawati. (2024). Pengaruh Kenaikan Harga BBM Subsidi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tulungagung. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(3), 46–57. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.564>
- Nurma Oktavia Sari & Ariusni. (2024). Pengaruh Subsidi Listrik Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Provinsi Sumatera Barat. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(4), 1–8.
- Ramadayanti, A., Sasana, H., & Jalunggono, G. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pertumbuhan Penduduk Dan Harga Listrik Terhadap Konsumsi Energi Sektor Rumah Tangga Di Indonesia Tahun 1990- 2018. *DINAMIC: DIRECTORY JOURNAL OF ECONOMIC*, 2(2).
- Sadiah, S., Virgantari, F., Andriyani, A., Hartini, S., & Achmad, D. (2020). DETERMINAN PERILAKU RUMAH TANGGA DALAM PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DI WILAYAH JAWA BARAT MENGGUNAKAN STRUCTURAL EQUATION MODELING.

- JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 121–134. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v5i2.1896>
- Sugartiningih, S. (2020). Pengaruh Subsidi Listrik Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia Periode 2004-2017. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(2), 64–73. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i2.2455>
- Ulky Maisarah, Muhayratu Farisha, Yani Rizal, & Safuridar Safuridar. (2024). Pengaruh Subsidi Energi dan Konsumsi Listrik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(4), 100–107. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i4.565>